



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

LKIP merupakan salah satu instrument perwujudan *good governance* sebagai hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui seluruh jajaran birokrasinya.

LKIP Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Litbang selama Tahun 2023. Diharapkan LKIP Bappeda Litbang ini dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam Tahun 2023. Mudah-mudahan ke depannya capaian kinerja dan substansi LKIP dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, Februari 2024

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara



EDI KESUMAJAYA, S.E., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197109201998031010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	I-2
1. Kedudukan	I-2
2. Tugas Pokok	I-4
3. Fungsi	I-4
4. Susunan Organisasi	I-5
5. Struktur Organisasi	I-7
C. Gambaran Umum Pelayanan.....	I-8
1. Kondisi Umum Pelayanan	I-8
2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	I-9
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	I-10
1. Sumber Daya Manusia	I-10
2. Pembiayaan	I-12
E. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP	I-13
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	I-14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. VISI DAN MISI	II-7
B. TUJUAN DAN SASARAN	II-7
1. Tujuan	II-7
2. Sasaran	II-8
C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	II-9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	II-11
E. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT).....	II-12
F. PERJANJIAN KINERJA	II-14
G. RENCANA ANGGARAN	II-15



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 202	III-1
	B. REALISASI ANGGARAN	III-8
BAB IV	PENUTUP	IV-1



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan Pemerintah untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari kolusi dan nepotisme. Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai visi dan misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bappeda Litbang sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada



masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan daerah mulai dari pejabatnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, Sehingga lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang, mulai dari eselon II sampai akhirnya kepada Bupati selaku kepala Daerah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) merupakan unsur pelaksana Daerah dibidang Perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/529/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.



Nomenklatur Bappeda Litbang terbagi menjadi Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Struktur Organisasi Bappeda Litbang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Bappeda Litbang dengan tingkat Eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh tiga bidang yaitu :

- a) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
- c) Bidang Penelitian dan Pengembangan



2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas tertentu dibidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan serta Pengendalian pembangunan

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian;
- b. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan dan bimbingan teknis dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- d. Pembinaan urusan tata usaha badan.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang sumber daya manusia, Pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Barito Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.



4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/529/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut :

1) Kepala Badan;

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris membawahi dua subbagian, yaitu:

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian

b. Sub bagian Program dan Keuangan

Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.



3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, pendataan dan informasi pembangunan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta penilaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah mengkoordinasikan tiga Sub Substansi, yaitu :

- a. Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Substansi Data dan Informasi;
- c. Sub Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

4) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur mengkoordinasikan tiga Sub Substansi, yaitu :

- a. Sub Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Sub Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Sub Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan.

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi dan



pengorganisasian kegiatan dalam penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

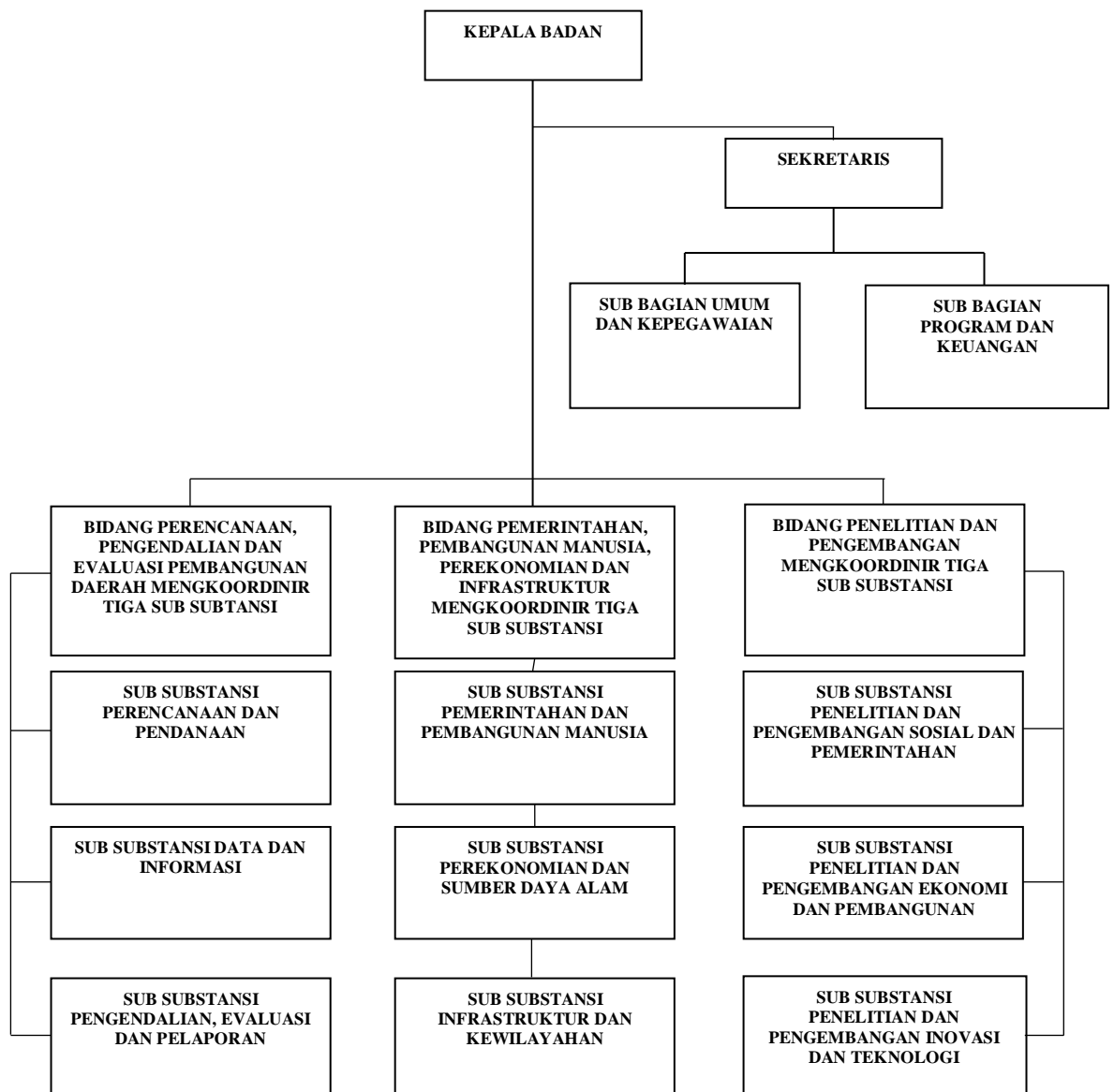
Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi tiga subbidang, yaitu:

- a. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan sosial dan Pemerintah;
- b. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan teknologi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/529/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Tugas pokok Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/529/2022 sebagai berikut :



C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan daerah dan perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan ditujukan



melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara merupakan analisis terhadap kinerja pelayanan untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban dan dari segi jumlah masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional;
2. Belum beragamnya Sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Belum optimalnya hasil penelitian/ kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan Pembangunan.



b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan;
3. Tersedianya dukungan Anggaran;
4. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis. Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang dengan Jumlah pegawai Tahun 2023 sebanyak 63 pegawai, yang mana terdiri atas Aparatur Sipil Negara sebanyak 24 orang, PPPK 2 orang dan



Tenaga Honor Kontrak 37 orang, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	-	2	2
4	Pejabat Fungsional Tertentu	3	3	6
5	Fungsional Umum	6	5	11
6	PPPK	1	1	2
7	Honor/Tenaga Kontrak	19	18	37
Jumlah		34	29	63

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kedudukan		Total
		ASN	Honor Kontrak	
1	Strata 3	2	-	2
2	Strata 2	4	-	4
3	Strata 1	15	20	35
4	Diploma 3	3	3	6
5	Diploma 2	-	1	1
6	SLTA/Sederajat	2	13	15
7	SLTP / Sederajat	-	-	-
Jumlah		26	37	63



Tabel 1.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah Menurut Golongan				Total
		A	B	C	D	
1	IV	4	3	1	-	8
2	III	4	2	6	6	18
3	II	-	-	-	-	-
Jumlah						26

2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pagu Bappeda Litbang dalam DPPA Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.053.632.962
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.912.212.441
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.581.144.115
	Jumlah	11.546.989.518



E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Bappeda Litbang Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan, serta sasaran strategis dapat dicapai.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

b. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan jabaran dari RKPD, PRPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan Bupati Barito Utara pada Januari 2023.

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda Litbang, maka Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Bappeda Litbang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;



2. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023;
Adapun Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%	Program : Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	567.282.000
	Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%	Program : Perencanaan Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	92.322.125
			- Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	4.993.750
			- Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	228.109.125
			Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : - Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	231.235.500



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
			- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	84.990.625
			Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.885.875
			- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	27.401.250
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	40.422.000
			Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan : - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.587.250
			- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.195.000
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	45.008.000



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.999.750
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	20.000.875
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.000.000
			- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.999.250
	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	40%	Program : Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	105.674.625
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			73.362.500	
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Litbang	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%	Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan :	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
			- Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	64.230.500
			Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	77.222.500
			Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	96.019.625



A. VISI DAN MISI

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi Kepala Daerah periode 2018-2023 adalah **“Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”**. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Litbang guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Bappeda Litbang sangat terkait pada pencapaian Misi yang ke 5, yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), dan Tujuan ke 5 yang berbunyi “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik (Good Governance), serta Sasaran yang ke 19, yaitu “Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik”.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi,



Bappeda Litbang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Peningkatan Fungsi Kelitbang secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi V PRPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang berbunyi “**Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)**”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Bappeda Litbang. Dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat berjalan selaras.

2. SASARAN

Untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Litbang menetapkan dua sasaran strategis :

1. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan hasil Litbang.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Bappeda Litbang



Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Bappeda Litbang dikatakan berhasil apabila target indikator sasaran tercapai sesuai yang ditetapkan. Proses pencapaian IKU Bappeda Litbang ini tidaklah mudah harus di mulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana kinerja Bappeda Litbang berhasil mencapai IKU-nya.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.
2	Peningkatan Fungsi Kelitbang secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil Litbang

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi dan kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara di Tahun 2023 dalam setiap misinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 3. Strategi Kebijakan Bappeda Litbang

Visi	:	Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
Misi	:	Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata kelola Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsistensi dan akuntabel berbasis IT.	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui <i>SIPD</i>	
Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.	Meningkatkan pemanfaatan penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah.	Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/kajian.	



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Merupakan Penjabaran Kinerja Utama yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan. Adapun IKU Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.	Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD.	Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur	Primer	IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD.
		Persentase RENJA perangkat daerah yang selaras RENSTRA.	Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.	Primer	RENJA perangkat daerah yang selaras RENSTRA.
		Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur	Primer	Usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.	Bidang Penelitian dan Pengembangan.	Primer	Hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.



E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan. Rencana kinerja ini menunjukkan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Rencana kinerja merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2023 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi dan berpedoman pada Rencana Strategis.

Sasaran strategis Tahun 2023, indikator kinerja dan target kinerja dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



Tabel 5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Litbang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD- Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra- Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	100% 100% 40%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%



F. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023 Bappeda Litbang telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya perjanjian kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan PD. Perjanjian kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, Program dan Anggaran sesuai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah,	<ul style="list-style-type: none">- Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD.- Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra- Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	100% 100% 40%	
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.	100%	



Tabel 7. Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	: Rp. 250.470.750,-	APBD
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp. 1.436.346.375,-	APBD
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	: Rp. 254.085.125,-	APBD

G. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 alokasi Anggaran murni Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebesar Rp8.842.414.518,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp4.053.632.962,-, Belanja Barang dan Jasa Rp3.897.313.681,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp891.467.875,-. Pada bulan Januari, Bappeda Litbang Kab. Barito Utara mengalami Pergeseran dana pada Perubahan Mendahului yang di sah kan pada tanggal 24 Mei 2023. Adapun penambahan pergeseran tersebut pada Belanja Barang dan Jasa yang semula Rp3.897.313.681,-, menjadi Rp3.896.689.181, sedangkan belanja modal yang semula Rp891.467.875,- menjadi Rp892.092.275.

Pada masa APBD Perubahan anggaran Bappeda Litbang mengalami penambahan pagu, adapun total penambahan tersebut adalah Belanja Bappeda Litbang Kab. Barito Utara menjadi Rp11.546.989.518,- dengan rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp4.912.212.441,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Rp2.581.144.115,-.



1. Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara

Target Belanja yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dipresentasikan pada tabel berikut:

**Tabel 8. Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Barito
Utara Tahun 2023**

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (Realisasi Keuangan)
Belanja Pegawai	Rp. 4.053.632.962,-	Rp.3.084.229.618,-	76,09%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.912.212.441,-	Rp.4.320.841.530,-	87,96%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.581.144.115,-	Rp.2.550.265.950,-	98,80%
JUMLAH	Rp. 11.546.989.518,-	Rp.9.955.337.098,-	86,22%

2. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis

Alokasi anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan pagu anggaran Bappeda Litbang mengalami penambahan pagu, adapun total penambahan tersebut adalah Belanja Bappeda Litbang Kab. Barito Utara menjadi Rp11.546.989.518,- dengan rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp4.912.212.441,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Rp2.581.144.115,-.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sarasannya, yang hasilnya akan mejadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dan dalam capaian kinerja Tahun 2023 disajikan pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Pengukuran Kinerja dan Prediksinya

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)



Adapun capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

A.1. Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD.

Indikator pertama yang menjadi indikator Kinerja Bappeda Litbang adalah persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD. Indikator tersebut guna mengevaluasi tingkat keselarasan IKU Renstra dengan RPJMD. Jika tingkat keselarasan IKU renstra dengan RPJMD tinggi, maka dapat dikatakan tercapainya sasaran strategis yaitu meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.

Tabel 2. *Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah*

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	B

**Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kab. Barito Utara*

Pada tahun 2023 realisasi untuk indikator kinerja yang pertama yaitu persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang direalisasikan untuk tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1.1 Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kabupaten Barito Utara

Pentingnya perwujudan Visi, Misi yang jelas arah, sasaran, serta tujuan dari pembangunan barito Utara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa daerah diwajibkan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas Rencana Pembangunan Daerah yang disusun melalui RPJMD dan Renstra PD. Adapun Pembuatan Laporan Evaluasi RKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai evaluasi pelaksanaan RKPD Perangkat Daerah (PD).

A.2. *Persentase RENJA perangkat daerah yang selaras Renstra*

Indikator kedua pada sasaran strategis meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah adalah persentase Renja perangkat daerah yang selaras Renstra.

Tabel 3. *Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah*

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Persentase Renja perangkat daerah yang selaras Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	B

**Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kab. Barito Utara*

Berdasarkan tabel diatas indikator kedua ini capaian kinerja Tahun 2022 adalah 100% dan pada Tahun 2023 realisasi untuk persentase Renja perangkat daerah yang selaras Renstra sebesar 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Beberapa faktor yang ikut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Komitmen perangkat daerah dalam menjaga konsistensi keselarasan dokumen perencanaan daerah.
- Aplikasi yang terintegrasi dari kementerian ke daerah (contoh : Krisna DAK dan SIPD).



- Database infrastruktur dari daerah ke pusat.

A.3. *Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang kabupaten yang terakomodir dalam APBD*

Indikator ketiga adalah persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD. Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD dapat diketahui dari jumlah usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD dibagi dengan jumlah usulan masyarakat melalui Musrenbang.

Tabel 4. *Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah*

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	87%	40%	33%	83%	40%	B

**Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kab. Barito Utara*

Pada Tahun 2022 persentase usulan masyarakat melalui musrenbang kabupaten yang terakomodir dalam APBD realisasinya sebesar 30,34% dari target sebesar 35% dengan capaian kinerja sebesar 87%. Jumlah usulan masyarakat melalui musrenbang yaitu sebanyak 435 usulan, dan terakomodir 132 usulan Sedangkan pada Tahun 2023, untuk persentase usulan masyarakat melalui musrenbang kabupaten yang terakomodir dalam APBD dari target sebesar 40% dan terealisasi sebesar 33% dengan capaian Kinerja sebesar 83%. Adapun jumlah usulan masyarakat melalui musrenbang yaitu sebanyak 483 usulan, dan terakomodir 158 usulan. Realisasi usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena



APBD meningkat dari tahun sebelumnya, namun persentase capaian mengalami penurunan dikarenakan persentase target meningkat dari tahun sebelumnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang direalisasikan untuk tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Penyelenggaraan Musrenbang (RKPD, RPJMD, RPJPD)

Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi. Output dari Musrenbang RKPD adalah rekapitulasi usulan Musrenbang Kecamatan di 9 (Sembilan) Kecamatan, Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita acara Hasil Musrenbang Kabupaten serta terlaksananya koordinasi pelaksanaan Musrenbang. Di dalam kegiatan ini juga termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD) di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi. Pada tingkat Desa/Kelurahan telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat pada 9 (Sembilan) Kecamatan yang kemudian dibahas dan dirumuskan kembali pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kecamatan dimulai di Kecamatan Teweh Baru dan kecamatan Teweh Selatan pada bulan Februari Tahun 2023 guna untuk mendapatkan keselarasan RKPD dan Renja Desa dan Kecamatan, maka diperlukan masukan dari Desa/Kelurahan, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan.



A.4. *Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.*

Indikator keempat adalah persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.

Tabel 5. Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	149,25%	100%	100%	100%	100%	B

**Sumber Data : Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kab. Barito Utara*

Hasil kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah adalah 3 (tiga) kajian yang dihasilkan atau 100% terealisasi dari target sebesar 100%. Sedangkan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Adapun kajian Litbang yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

a. Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Barito Utara

Mayoritas penduduk kabupaten Barito Utara bekerja di lapangan usaha pertanian, Perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan (39,03%). Sehingga dapat dikatakan bahwa Masyarakat di kabupaten Barito Utara masih bergantung pada sektor primer atau pertanian. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam perekonomian kabupaten barito Utara.

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), dijabarkan bahwa Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan



menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya local, serta mendatangkan pendapatan bagi Masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan Masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Dalam hal penetapan Produk Unggulan daerah harus dilakukan dengan memenuhi kriteria dan kajian terstruktur, Dimana pada pelaksanaannya dalam penentuan produk unggulan daerah adalah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal penetapannya.

Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk menghasilkan suatu rekomendasi PUD berupa produk pertanian dan Perkebunan berdasarkan suatu kajian yang obyektif dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang mana hasil kajian tersebut akan diajukan sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan perhitungan nilai akhir calon PUD, maka produk pertanian dan Perkebunan yang diusulkan sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara adalah : Sawit (skor 35,3284); padi ladang (skor 35.1481); jagung (skor 34,2230).

Disamping itu disarankan juga agar produk karet (skor 34,0067) dapat dimasukkan ke komoditas andalan, sedangkan untuk anyaman rotan (skor 32,4194) masuk produk potensial yang tetap diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Barito Utara. Sedangkan untuk pengembangan PUD wajib dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD Kabupaten Barito Utara.

b. ROADMAP (SIDa) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

Pengembangan sistem inovasi nasional merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dinyatakan bahwa pemerintah menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan inovatif melalui strategi dan program yang terarah dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam peraturan bersama ini dinyatakan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan dan aktivitas penelitian, pengembangan dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa)



merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatannya).

Rancangan Roadmap SIDA yang dibuat ini masih belum final karena tidak dibuat melalui kajian ilmiah yang komprehensif, melainkan sebagai acuan sementara menunggu penyempurnaan yang akan disusun bersama pihak ketiga (perguruan tinggi) yang dikuatkan dalam bentuk Perda tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Utara.

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja tahun 2023.

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	B
2	Persentase Renja perangkat daerah yang selaras Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	B
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	87%	40%	33%	83%	40%	B
4	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	149,25%	100%	100%	100%	100%	B



B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 adalah : penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 3.084.229.618,- atau 76,09% dan penyerapan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.320.841.530,- atau 87,96% .

Rincian anggaran dan realisasi belanja Operasi (belanja Pegawai dan belanja barang jasa) dan belanja Modal Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 7. Belanja Bappeda Litbang Tahun 2023

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	9.359.194.893	6.778.050.778	5.671.456.871	83,67	83,67				
5 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.036.750	25.036.750	23.551.000	94,07	100,00				
5 01 01 2 01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.727.250	4.727.250	4.727.250	100,00	100,00				
5 01 01 2 01 02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	2.682.500	2.682.500	2.603.000	97,04	100,00				
5 01 01 2 01 03	koordinasi dan penyusunan dokumen	4.180.500	4.180.500	4.180.500	100,00	100,00				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	perubahan RKA-SKPD									
5 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.934.500	2.934.500	1.528.250	52,08	100,00				
5 01 01 2 01 05	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	5.782.500	5.782.500	5.782.500	100,00	100,00				
5 01 01 2 01 06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.729.500	4.729.500	4.729.500	100,00	100,00				
5 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.095.441.962	4.095.441.962	3.118.231.618	76,14	76,19				
5 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.846.182.962	3.846.182.962	2.885.179.618	75,01	75,01				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	242.490.000	242.490.000	228.570.000	94,26	94,26				
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.044.250	3.044.250	3.044.250	100,00	100,00				
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.842.750	1.842.750	1.437.750	78,02	78,02				
5	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.882.000	1.882.000	-	-	100,00				
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian	169.375.000	169.375.000	146.980.000	86,78	95,08				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
						Perangkat Daerah									
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.375.000	69.375.000	67.280.000	96,98	100,00				
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	100.000.000	79.700.000	79,70	91,67				
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.512.188.769	922.775.544	894.702.397	96,96	98,85	589.413.225,00	558.769.950,00	94,80	99,36
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40.000.000	39.400.000	98,50	100,00				
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	61.405.453	61.405.453	61.015.750	99,37	100,00				



KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	589.413.225	-	-	-	-	589.413.225	558.769.950,00	94,80	99,36
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	4.950.000	99,00	100,00				
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.820.000	66.820.000	52.940.000	79,23	91,67				
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	35.828.091	35.828.091	33.834.000	94,43	100,00				
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	36.610.000	36.610.000	32.705.000	89,33	100,00				
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	39.645.000	99,11	100,00				
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.112.000	632.112.000	630.212.647	99,70	100,00				
5	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	5.000.000	5.000.000	1.200.000	24,00	100,00				



KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
5 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.991.730.890	-	-	-	-	1.991.730.890,00	1.991.496.000,00	99,99	100,00
5 01 01 2 07 07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.991.730.890	-	-	-	-	1.991.730.890	1.991.496.000	99,99	100,00
5 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	0,00	0,00	-	-	-				
5 01 01 2 07 07	Pengadaan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	-	-	-				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.176.420.014	1.176.420.014	1.163.641.156	98,91	100,00				
5	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00				
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.014	150.000.014	145.231.156	96,82	100,00				
5	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	1.020.120.000	1.020.120.000	1.012.110.000	99,21	100,00				
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.001.508	389.001.508	324.350.700	83,38	85,72				
5	01	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	8.500.000	8.500.000	4.950.200	58,24	75,00				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan									
5 01 01 2 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.338.400	155.338.400	103.873.750	66,87	68,33				
5 01 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	7.500.000	7.400.000	98,67	100,00				
5 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.523.100	3.523.100	1.100.000	31,22	75,00				
5 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Reh abilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	89.000.008	89.000.008	88.333.500	99,25	100,00				
5 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Reh abilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	85.000.000	85.000.000	84.998.500	100,00	100,00				



KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	atau Bangunan Lainnya									
5 01 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	40.140.000	40.140.000	33.694.750	83,94	91,67				
5 01 01 2 13	Penataan Organisasi	-	-	-	-	-				
5 01 01 2 13 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-				
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.554.210.250	1.554.210.250	1.207.852.516	77,71	96,12				
5 01 02 2 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	912.559.125	912.559.125	639.443.597	70,07	96,30				



KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	129.187.000	129.187.000	97.252.000	75,28	81,05				
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	37.053.000	37.053.000	19.775.000	53,37	75,00				
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	105.674.625	105.674.625	87.275.200	82,59	100,00				
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	73.362.500	73.362.500	64.810.000	88,34	100,00				
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	567.282.000	567.282.000	370.331.397	65,28	100,00				
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	316.226.125	316.226.125	278.516.446	88,08	95,00				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	Pembangunan Daerah									
5 01 02 2 02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	231.235.500	231.235.500	194.413.456	84,08	90,00				
5 01 02 2 02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	84.990.625	84.990.625	84.102.990	98,96	100,00				
5 01 02 2 03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	325.425.000	325.425.000	289.892.473	89,08	97,05				
5 01 02 2 03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92.322.125	92.322.125	84.303.325	91,31	95,00				



KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5 01 03 2 03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	4.993.750	4.993.750	-	-	-				
5 01 03 2 03 03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	228.109.125	228.109.125	205.589.148	90,13	100,00				
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	379.499.250	379.499.250	289.383.202	76,25	84,29				
5 01 03 2 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	152.709.125	152.709.125	117.987.103	77,26	82,85				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
5 01 03 2 01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.885.875	84.885.875	73.871.725	87,02	88,05				
5 01 03 2 01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	27.401.250	27.401.250	17.884.450	65,27	78,25				
5 01 03 2 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD.	40.422.000	40.422.000	26.230.928	64,89	75,03				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	RPJMD dan RKPD)									
5 01 03 2 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	86.790.250	86.790.250	74.998.949	84,36	85,99				
5 01 03 2 02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.587.250	23.587.250	14.522.250	61,57	63,25				
5 01 03 2 02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	18.195.000	18.195.000	17.450.000	95,91	95,91				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
5 01 03 2 02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.008.000	45.008.000	43.026.699	95,60	98,80				
5 01 03 2 03	Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	139.999.875	139.999.875	96.397.150	68,86	72,02				
5 01 03 2 03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	59.999.750	59.999.750	34.136.350	56,89	60,03				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
5 01 03 2 03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	20.000.875	20.000.875	13.386.750	66,93	70,25				
5 01 03 2 03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.000.000	45.000.000	35.875.000	79,72	83,03				
5 01 03 2 03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.999.250	14.999.250	12.999.050	86,66	89,35				



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	254.085.125	254.085.125	236.378.559	93,03	100,00				
5 05 02 2 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	64.230.500	64.230.500	63.295.655	98,54	100,00				
5 05 02 2 02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	64.230.500	64.230.500	63.295.655	98,54	100,00				
5 05 02 2 03	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	93.835.000	93.835.000	77.197.500	82,27	100,00				
5 05 02 2 03 02	Penelitian dan Pengembangan	77.222.500	77.222.500	77.197.500	99,97	100,00				



KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7				
	Perindustrian dan Perdagangan									
5 05 02 2 03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	-	-	-	-	-				
5 05 02 2 03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	16.612.500	16.612.500	16.608.750	99,98	100,00				
5 05 02 2 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	96.019.625	96.019.625	95.885.404	99,86	100,00				
5 05 02 2 04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	96.019.625	96.019.625	95.885.404	99,86	100,00				
	TOTAL	11.546.989.518	8.965.845.403	7.405.071.148	82,59	86,71	2.581.144.115,00	2.550.265.950,00	98,80	99,68

*Sumber Data : Sub Bagian Perogram dan Keuangan Bappeda litbang Kab. Barito Utara



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BARITO UTARA**

Adapun rencana aksi dalam penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :



Tabel 9. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Litbang Kabupaten Barito Utara

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang Selaras RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah yang Selaras Renstra, Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang Terakomodir dalam APBD.					Program : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra, Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen yang sesuai pedoman dan peraturan tersusunnya perencanaan dan pendanaan	906.846.500	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			30	50	10	10	-			Sub kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi Publik	79.187.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			45	35	10	10	-			Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Laporan Terkoordinasinya Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	37.053.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10				Sub kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	122.674.750	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			40	40	10	10				Sub kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Kegiatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	100.637.500	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												dan Infrastruktur
			10	40	40	10			Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPD/RPJPD, RPJMD, RKP D)	567.294.250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
									Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dalam SIPD	91.229.750	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	40	40	10			Sub kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Informasi Pembangunan Daerah	61.238.375	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10	30	50	10			Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	29.991.375	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
									<u>Kegiatan :</u> Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen rencana kerja jangka pendek (Renja) perangkat daerah yang selaras Renstra	159.241.000	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	50	30	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	34.322.375	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10	20	40	30			Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	4.993.750	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			20	30	30	20			Sub Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	119.924.875	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra, Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	102.709.625	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	50	30	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	34.886.375	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	30	50	10			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	27.401.250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			30	10	50	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.422.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	311.790.250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	30	50	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	273.587.250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.195.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	70	10	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.008.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	115.000.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.999.875	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.000.875	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			40	10	40	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.000.000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.999.250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan						Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang sosial dan kependudukan	64.230.500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
			10	40	40	10							



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	93.835.000	Kabid Penelitian dan Pengembangan
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Kajian/ Penelitian Perindustrian dan Perdagangan	77.222.500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen Kajian/ Penelitian Pertanian, Perkebunan dan Pangan	16.612.500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
									Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian pengembangan inovasi dan teknologi	96.019.625	Kabid Penelitian dan Pengembangan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dokumen Kajian/ Penelitian Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	96.019.625	Kabid Penelitian dan Pengembangan

**Sumber Data : Sub Bagian Program dan Keuangan Bappeda litbang Kab. Barito Utara*



Tabel 10. Tabel Analisis Tingkat Efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6/9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Keselarasan dokumen perencanaan daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%	100%	100%	733.522.000	487.358.397	66,44	1,51
		Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA	100%	100%	100%	1.021.150.375	857.792.121	84,00	1,19
		Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten Yang Terakomodir dalam APBD	40%	33%	83%	179.037.125	152.085.200	84,95	1,0



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6/9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Litbang	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%	100%	100%	254.085.125	236.378.559	93,03	1,07

**Sumber Data : Sub Bagian Program dan Keuangan Bappeda litbang Kab. Barito Utara*



Jika tingkat capaian indikator kinerja dikaitkan dengan tingkat penyerapan anggaran akan diperoleh tingkat efisiensi, yaitu rasio antara tingkat capaian indikator kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran. Tingkat efisiensi dimaksudkan untuk mengukur besarnya anggaran yang diperlukan untuk mencapai ukuran kinerja tertentu. Sedangkan tinggi rendahnya tingkat penyerapan anggaran diukur dengan cara yang sama dengan pengukuran tingkat capaian indikator kinerja.

Adapun kategori penilaian efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

$n \geq 1,50$ = Sangat Baik,

$1,15 \geq n < 1,50$ = Baik,

$1 \geq n < 1,15$ = Cukup dan

$n \leq 1$ = Kurang

Berdasarkan kategori tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD tingkat efisiensi 1.51, maka penilaian efesiensinya sangat baik dalam tingkat penyerapan anggaran.
2. Pada indikator kinerja Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA tingkat efisiensi 1,19, maka penilaian efesiensi baik dalam tingkat penyerapan anggaran.
3. Pada Indikator kinerja persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD tingkat efisiensi 0,96, maka penilaian efisiensinya cukup dalam Tingkat penyerapan anggaran.
4. Pada indikator Persentase Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah tingkat efisiensi 1,07, maka penilaian efisiensinya cukup dalam Tingkat penyerapan anggaran.



BAB IV

PENUTUP

LKIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja dan juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda Litbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara ini merupakan laporan capaian kinerja selama Tahun 2023.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik itu informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan dan catatan-catatan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran. LKIP juga menjelaskan upaya-upaya perbaikan kinerja agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang telah direncanakan.

Sebagai instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2023 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak dalam peningkatan kinerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil capaian kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi demi peningkatan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Pendayagunaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana serta sarana pendukung lainnya secara optimal guna mencapai hasil yang optimal.
2. Penambahan jumlah tenaga teknis dan fungsional sehingga diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal.



3. Perlunya bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur.
4. Perlu adanya peningkatan komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.
5. Memaksimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap rencana program/kegiatan perangkat daerah sejak proses penyusunan rancangan Renja.
6. Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikatornya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

Pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas bappeda Litbang untuk mencapai dua sasaran strategis dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 11.546.989.518,- dengan realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp9.955.337.098,- atau sebesar 86,22%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

JL. JEND. A. YANI NO. 186 TELP. (0519) 21130, FAX. 21611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**
Jabatan : Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, Januari 2023
Pihak Pertama,

Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.
NIP. 19631014 199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%
		Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%
		Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	40%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 250.470.750,-	APBD
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.436.346.375,-	APBD
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 254.085.125,-	APBD

Muara Teweh, Januari 2023

Bupati Barito Utara,

H. Nadalsyah

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara,

Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.
NIP. 19631014 199003 1 007

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang
Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.	Primer	IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD.
		Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.	Primer	RENJA perangkat daerah yang selaras RENSTRA.
		Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.	Primer	Usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	Bidang Penelitian dan Pengembangan.	Primer	Hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.

Muara Teweh, Januari 2023
Kepala Bappeda Litbang



Ir. H. JAINAL Abidin, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%
		Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%
		Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	40%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	100%

Muara Teweh, Januari 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara,



Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.
NIP. 19631014 199003 1 007

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang Selaras RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah yang Selaras Renstra, Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang Terakomodir dalam APBD.					Program : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra, Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen yang sesuai pedoman dan peraturan tersusunnya perencanaan dan pendanaan	906,846,500	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			30	50	10	10				Sub kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi Publik	79,187,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			45	35	10	10				Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Laporan Terkoordinasinya Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	37,053,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10				Sub kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	122,674,750	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			40	40	10	10				Sub kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Kegiatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	100,637,500	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10				Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPD/RPJPD,RPJMD,RPJMD)	567,294,250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
										Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dalam SIPD	91,229,750	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10	40	40	10				Sub kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Informasi Pembangunan Daerah	61,238,375	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10	30	50	10				Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	29,991,375	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
										Kegiatan : Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen rencana kerja jangka pendek (Renja) perangkat daerah yang selaras Renstra	159,241,000	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10	50	30	10				Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	34,322,375	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10	20	40	30				Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	4,993,750	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			20	30	30	20			Sub Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	119,924,875	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
							Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra, Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	102,709,625	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	50	30	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	34,886,375	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	30	50	10			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	27,401,250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			30	10	50	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40,422,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
									Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	311,790,250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	30	50	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	273,587,250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18,195,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	70	10	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,008,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	115,000,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,999,875	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20,000,875	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			40	10	40	10			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,000,000	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14,999,250	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan					Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang sosial dan kependudukan	64,230,500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Kajian/Penelitian Pengembangan Pariwisata	64,230,500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
									Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	93,835,000	Kabid Penelitian dan Pengembangan
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Kajian/Penelitian Perindustrian dan Perdagangan	77,222,500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen Kajian/Penelitian Pertanian, Perkebunan dan Pangan	16,612,500	Kabid Penelitian dan Pengembangan
									Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian pengembangan inovasi dan teknologi	96,019,625	Kabid Penelitian dan Pengembangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10	40	40	10			Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dokumen Kajian/Penelitian Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode pPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	96,019,625	Kabid Penelitian dan Pengembangan

Muara Teweh, Januari 2023
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara



Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007

